

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, cetakan ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Agustin Narang, Teras, *Reformasi Hukum Pertanggungjawaban Seorang Wakil Rakyat*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.
- , *Reformasi Hukum*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Andreae, Fockema, *Kamus Istilah Hukum : Belanda – Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1983.
- Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, UI-Jakarta, 1990.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta,.
- Busroh, Abu Daud, *Ilmu Negara*, Bumi aksara, Jakarta 1998.
- Deddy Supriady Bratakusumah, dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Dennis A. Rondinelli dalam Ismail Husen, Yayasan Karya Dharma, IIP, Jakarta, 1998.
- Djokosutono, *Hukum Tata Negara*, (dihimpun oleh Harun al Rasid), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Researc*, Jilid I, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984
- HK, Nurdin HK, *Penelitian Ilmiah Perlu Libatkan Masyarakat*, Jawa Pos, 8 Oktober 2005
- Indrianto, Nur dan Supomo, Bambang, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta, BPFE
- Kertapradja, E. Koswara, *Peranan dan Kedudukan Camat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada Forum Democratic Reform Support Program (DRSP), 5 November 2007.
- Lapera, *Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001

- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Pandoyo, Toto, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945, Proklamasi dan Kekuasaan MPR*, Liberty, Yogyakarta, 1984
- Sapari, Sumber, *Tata Pemerintahan dan administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977
- Soekanto, Soeryono, “*Suatu tinjauan sosiologis hukum terhadap masalah-masalah sosial*”, Alumni Bandung, 1982
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soemitro, Ronny Hanintijo, *Peran Metodologi dalam Pengembangan Ilmu Hukum, Masalahmasalah Hukum*, Majalah.
- *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Soemantri, Sri, *Tentang Lembaga-lembaga Tinggi Negara menurut UUD 1945*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993
- Soenarjo, *Metode Riset I*, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 1985
- Supranto, J , *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Sudiyat, Iman, *Asas Asas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta 1985.
- Suny, Ismail, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Bani, Jakarta, 1987
- Widjaja, HAW, *Kepemimpinan Pemerintahan Daerah*, Bahan Kuliah, Palembang, 2001.
- Widjaja,UAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Wijaya, HAW, *Pemerintahan Desa/ Marga: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Suatu Telaah Administrasi Negara)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Bagian Hukum Setda Pati, 2006, Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- , Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Peraturan

Pasal 18 b ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Dusun Dalam Desa dan Lingkungan Dalam Kelurahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 1990 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Kecamatan Winong, Kecamatan Gabus, Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Sukolilo .

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2001 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penyusunan APBDesa.

Peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2001 tentang kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di DEsa/ Kelurahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2001 tentang Kerjasama Antar Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2001 tentang pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2001 tentang pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2007 tentang pedoman Penyusunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2007 tentang pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintah Daerah kepada Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2007 tentang Alokasi dana Desa.

Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa..

Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2007 tentang Tatacara Pengisian Lowongan Perangkat Desa Lainnya.

Website :

Darnadi, Dandung, 2001, www.ireyogya.org.

<http://agunkzz-thea.blogspot.com/2009/02/pengertian-pemerintahan-desa.html>

Hakim, Abdul & Endah Setyowati. Perubahan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Tantangannya terhadap Pengembangan Sumber Daya Aparatur, <http://yogakusuma.wordpress.com/2009/03/11/saya-dan-makalah-politik-dan-pemerintahan-desa/makalah-desa-revisi/>

<http://agunkzz-thea.blogspot.com/2009/02/pengertian-pemerintahan-desa.html>,
diakses : 27 -05- 2012

Wikipedia, ensiklopedia bebas – diakses : 25 Mei 2012

Sumartono, *Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Badan Perwakilan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* <http://jurnalskripsisitesis.wordpress.com/2008/03/22/kemitraan-pemerintah-desa-dengan-badan-perwakilan-desa-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-desa/> , diakses April 2012.

<http://anissaisyaa.blogspot.com/2011/11/pengertian-wewenang.html> : akses 9 Juni 2012

<http://ventznino.blogspot.com/2012/03/pengertian-wewenang-peranan-staff.html>: akses 9 Juni 2012

<http://anissaisyaa.blogspot.com/2011/11/pengertian-wewenang.html> : akses 9 Juni 2012

Suryokoco Suryoputro, *Posisi Politik dan Kewenangan Desa* [http:// relawandes.wordpress.com/2008/06/16/posisi-politik-dan-kewenangan-desa/](http://relawandes.wordpress.com/2008/06/16/posisi-politik-dan-kewenangan-desa/) : akses April 2012

Pengaruh Motivasi Terhadap Peningkatan Kinerja,
[http://harisahmad.blogspot.com/2010/05/](http://harisahmad.blogspot.com/2010/05/pengaruh-motivasi-terhadap-peningkatan.html) *pengaruh-motivasi-terhadap-peningkatan.html*, diakses April 2012

Lain-lain

Sekretariat Negara RI, *Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah*, 2004, Jakarta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Winong Dalam Angka 2010

Balairung, Edisi 33/TH. XVI/2000, hlm 34.

